

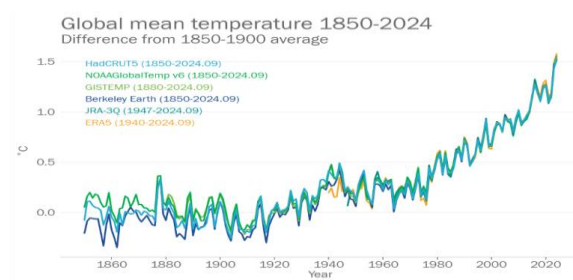
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan kebutuhan dan aktivitas manusia yang semakin kompleks menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk keperluan pembangunan. Pembangunan di berbagai aspek kehidupan telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, kegiatan pembangunan seperti konversi lahan untuk kebutuhan tambak, perumahan, serta industri, ditambah dengan efek perubahan iklim justru membawa dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan yang menyebabkan degradasi lingkungan, terutama di wilayah pesisir.

Ekosistem pesisir yang mengalami degradasi cukup parah akibat pemanfaatan kurang memperhatikan aspek keberlanjutannya adalah hutan mangrove yang mana keberadaannya kini semakin terancam dan berada di ambang kepunahan akibat berbagai ancaman, baik dari aktivitas manusia maupun perubahan iklim.



Gambar 1. 1 Suhu Rata-rata Global 1850-2024

Sumber: *World Meteorological Organization* (2024)

Gambar suhu rata-rata global tahun 1850-2024 mengindikasikan tahun 2024 merupakan tahun dengan suhu rata-rata global yang diperkirakan melampaui suhu tahun 2023 dimana sejak Juni 2023 hingga September 2024 yang terhitung 16 bulan berturut-turut, suhu rata-rata global kemungkinan melampaui seluruh yang tercatat sebelumnya. Pada bulan Januari-September 2024 rata-rata suhu permukaan udara global mencapai 1,54 derajat celcius yang didorong oleh peristiwa pemanasan El Nino (*World Meteorological Organization*, 2024).

Perubahan iklim global, yang ditandai dengan peningkatan suhu udara rata-rata di berbagai negara/wilayah, juga berdampak signifikan di Indonesia sebagai negara kepulauan tropis yang rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia mengalami peningkatan suhu rata-rata tahunan. Data dari 117 stasiun pengamatan BMKG, pada periode 1991-2020 suhu udara rata-rata periode 1991-2020 di Indonesia sebesar 26.7 derajat celcius dan tahun 2024 suhu udara rata-rata mencapai 27.5 derajat celcius (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2025). Dengan demikian, anomali suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 0.8 derajat celcius sehingga menduduki urutan pertama tahun terpanas di Indonesia sepanjang periode pengamatan tahun 1981 hingga 2024.

Dampak paling jelas dari perubahan iklim adalah kenaikan permukaan laut akibat pencairan es di kutub dan ekspansi termal air laut. Hutan mangrove tumbuh di sepanjang pesisir dan terumbu karang dangkal, di mana mereka sensitif terhadap perubahan ketinggian air. Kenaikan permukaan laut yang cepat dapat menyebabkan erosi pantai, merendam daerah pertumbuhan mangrove, dan mengubah ekosistem

tanah yang menjadi dasar pertumbuhan mangrove. Ketika area ini tergenang terlalu lama atau terlalu dalam, mangrove tidak mampu beradaptasi dengan perubahan cepat tersebut, yang dapat mengakibatkan kematian pohon mangrove secara massal. Secara sederhana, perubahan iklim telah mengancam keberadaan hutan mangrove.

Saat ini total hutan mangrove yang tersisa secara global hanya 40% saja dan berada di kawasan lindung. Total hutan mangrove yang lebih dari 75% berada di beberapa negara antara lain Brasil, Bangladesh, dan Meksiko berada di kawasan lindung. Akan tetapi, terdapat hutan mangrove terlindungi yang persentasenya kurang dari 5% seperti berada di negara Papua Nugini, Malaysia, dan Myanmar (Laporan *State of the World's Mangroves* (2024)). Saat ini, Global Mangrove Watch memberikan informasi terbaru setiap bulannya terkait titik-titik lenyapnya 50% mangrove dunia. Sekitar 1-2% per tahun merupakan laju hilangnya mangrove dunia (Polidoro dalam Elfayetti (2024)).

Kondisi ini mengingatkan akan pentingnya hutan mangrove dalam berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya global dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait berbagai aspek, berupa pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11), penanganan perubahan iklim (SDG 13), ekosistem laut (SDG 14), dan kehidupan di darat (SDG 15). Oleh karena itu, mangrove berperan penting dalam aspek kota dan komunitas yang berkelanjutan, penyediaan mata pencaharian, mitigasi perubahan iklim, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Berikut di bawah ini tabel luas wilayah hutan mangrove secara global yang keberadaannya menghadapi tekanan akibat deforestasi & perubahan tata guna lahan.

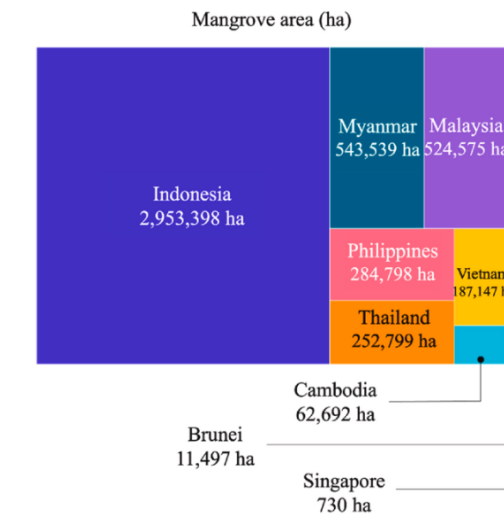
Tabel 1. 1 Luas Wilayah Hutan Mangrove secara Global

No	Wilayah	Jumlah area km2	Jumlah % global
1.	Afrika Timur & Selatan	7,749	5.3%
2.	Timur Tengah	358	0.2%
3.	Asia Selatan	9,749	6.6%
4.	Asia Tenggara	9,749	6.6%
5.	Asia Timur	221	0.2%
6.	Australia & Selandia Baru	10,348	7.0%
7.	Kepulauan Pasifik	5,790	3.9%
8.	Amerika Utara & Tengah & Karibia	21,270	14.4%
9.	Amerika Selatan	19,469	13.2%
10.	Afrika Barat & Tengah	22,802	15.5%
Total		147,256	100%

Sumber: *Global Mangrove Alliance* (2024)

Data di atas menjelaskan wilayah Afrika Barat & Tengah menempati wilayah yang hutan mangrovenya paling luas yaitu 147,256 km² atau 15.5% kemudian disusul oleh negara Amerika Utara & Tengah & Karibia sebesar 21,270 km² atau 14.4%. Dapat diketahui pula bahwa terdapat dua wilayah yang mempunyai luasan mangrove lebih kecil yaitu Timur Tengah sebesar 358 km² atau 0.2% dan Asia Timur sebesar 221 atau 0.2%. Asia Tenggara mempunyai sekitar sepertiga atau hampir 50.000 km² dari seluruh tutupan mangrove di dunia. Berikut

dibawah ini merupakan luas mangrove (ha) untuk setiap negara di Asia Tenggara (GMW 3.0 dalam Penelitian Blanton, A., dkk (2024).



Gambar 1. 2 Luasan Mangrove Asia Tenggara

Sumber: GMW 3.0 dalam Penelitian Blanton, A., dkk (2024).

Data luasan mangrove Asia Tenggara di atas menjelaskan Negara Myanmar memiliki luas mangrove sebesar 543,539 ha, Negara Malaysia sebesar 524,575 ha, Negara Philippines sebesar 284,798 ha, Negara Thailand sebesar 252,799 ha, Negara Vietnam sebesar 187,147 ha, Negara Kamboja sebesar 62,692 ha, Negara Brunei sebesar 11,497 ha. Kemudian, Negara Singapore menjadi negara yang memiliki luasan mangrove terkecil di Asia Tenggara yaitu hanya mencapai 730 ha dan Negara Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang mempunyai luasan mangrove terbesar yaitu mencapai 2,953,398 ha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2023, kawasan hutan mangrove tersebar secara luas pada 37 provinsi di Indonesia yang total luasnya mencapai 3.442.614. Berikut di bawah ini merupakan Data Luas Mangrove

Eksisting dan Potensi Habitat Mangrove Tahun 2023 untuk setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 1. 2 Data Luas Mangrove Eksisting dan Potensi Habitat Mangrove Tahun 2023

No	Provinsi	Luas (Ha)	
		Mangrove Eksisting	Potensi Habitat Mangrove
1.	Aceh	30.137	18.126
2.	Sumatera Utara	59.765	25.458
3.	Sumatera Barat	16.638	977
4.	Riau	231.038	13.431
5.	Kepulauan Riau	66.939	5.183
6.	Kepulauan Bangka Belitung	66.583	9.594
7.	Bengkulu	2.757	1.823
8.	Jambi	12.434	667
9.	Sumatera Selatan	171.265	48.021
10.	Lampung	10.096	349
11.	Banten	3.787	11.027
12.	DKI Jakarta	613	39
13.	Jawa Barat	12.205	39.305
14.	Jawa Tengah	14.339	43.140
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	15	12
16.	Jawa Timur	30.888	42.173
17.	Bali	2.287	237
18.	Nusa Tenggara Barat	11.130	4.182
19.	Nusa Tenggara Timur	22.997	4.230

20.	Kalimantan Barat	162.219	14.025
21.	Kalimantan Tengah	46.574	18.470
22.	Kalimantan Selatan	81.765	31.638
23.	Kalimantan Timur	240.005	112.972
24.	Kalimantan Utara	203.926	135.421
25.	Sulawesi Utara	11.987	1.371
26.	Gorontalo	9.277	13.837
27.	Sulawesi Tengah	36.340	12.142
28.	Sulawesi Barat	3.526	2.523
29.	Sulawesi Selatan	11.067	124.604
30.	Sulawesi Tenggara	65.000	28.609
31.	Maluku Utara	47.750	852
32.	Maluku	187.125	408
33.	Papua Barat	326.035	804
34.	Papua	162.242	2.863
35.	Papua Barat Daya	154.119	3.669
36.	Papua Tengah	282.504	3.143
37.	Papua Selatan	645.238	2.307
Jumlah (Ha)		3.442.614	777.636

Sumber: Kepmen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)

Data dalam tabel di atas memaparkan Provinsi Papua Selatan memiliki luasan mangrove terbesar di Indonesia mencapai 645.238 ha. Kemudian disusul oleh Provinsi Papua Barat sebesar 326.035 ha, Provinsi Papua Tengah sebesar 282.504 ha, Provinsi Kalimantan Timur sebesar 240.005 ha dan Provinsi Riau sebesar 231.038 ha. Dapat diketahui pula Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan

wilayah yang luas mangrove nya paling kecil hanya 15 ha dan disusul oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 613 ha. Sementara itu, di kategori luas potensi habitat mangrove terluas diduduki oleh Provinsi Kalimantan Utara sebesar 135.421 ha dan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu total mencapai 124.604 ha.

Luasan mangrove tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang hanya mencapai 2.320.609,89 ha (Walhi, 2024), akan tetapi justru pemerintah sudah mempersiapkan rencana proyek reklamasi sampai dengan tahun 2040 setidaknya seluas 3.527.120,17 hektar proyek reklamasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah, perlindungan mangrove hanya diberikan seluas 52.455,91 hektar saja.

Dapat dilihat perbandingan tersebut sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan luasan proyek reklamasi (Walhi, 2023). Adanya proyek pembangunan reklamasi dan industri di berbagai wilayah tanpa memperhatikan aspek sosial, budaya dan lingkungan yang ada mencerminkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana telah dimandatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat 33, telah diberikan kepada sektor swasta maupun privat.

Aktivitas pengerukan lingkungan mangrove masih ditemukan pada Januari 2025 yang dilakukan oleh pihak swasta, salah satunya yaitu di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta di mana dikabarkan untuk proses reklamasi. Adanya contoh tersebut dapat terlihat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesungguhnya belum optimal untuk implementasinya (Tempo.com, 2025). Padahal, saat ini pengelolaan ekowisata mangrove telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Pasal-pasal dalam UU ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan dasar hukum bagi perlindungan ekosistem kawasan yang penting seperti hutan mangrove.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah menyebutkan sebagian besar kondisi mangrove di Jawa Tengah mengalami kerusakan. Ekosistem mangrove menghadapi banyak tekanan pembangunan, dengan demikian maka pengelolaannya harus menjadi bagian kesatuan dari pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2023 tentang (Rencana Pembangunan Daerah) RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rehabilitasi mangrove di Jawa Tengah seluas 9 Ha di tahun 2021 dan tahun 2022 seluas 8,89 Ha.

Kerusakan ekosistem mangrove ini memerlukan tindakan pemulihan dan pengelolaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pendapat (Maryono dalam Setiawan dan Herbasuki., 2020) menjadi relevan dalam menyusun strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang tepat. Identifikasi *stakeholders* dapat dilakukan dengan mengelompokkan *stakeholder* yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu

stakeholder primer, *stakeholder* sekunder, dan *stakeholder* kunci (Maryono et al dalam Setiawan dan Herbasuki, 2020).

Penentuan peran *stakeholders* menggunakan teori peran *stakeholders* yang diklasifikasikan menjadi 5 (empat) diantaranya, yaitu policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, akselerator. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam proses implementasi, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, struktur birokrasi (Edward III dalam Sajid dan Nurharjadmo, 2023).

Pemerintah yang merupakan salah satu *stakeholders* telah melakukan rehabilitasi, namun sampai saat ini hanya terdapat satu wilayah di Jawa Tengah yang ekosistem mangrovenya masuk dalam kategori baik yaitu Kepulauan Karimun, sementara itu daerah yang masuk dalam kategori sedang antara lain Kebumen, Cilacap, Kabupaten Jepara, dan Brebes. Wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kondisi rusak yaitu Pati, Demak, Kabupaten Rembang, Batang, Pekalongan, Pati, Purworejo, Tegal, Pemalang, Tegal, dan Kota Semarang. Berikut dibawah ini merupakan sebaran kawasan ekosistem mangrove di Jawa Tengah beserta rincian luas kerusakannya.

Tabel 1. 3 Sebaran kawasan ekosistem mangrove di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Mangrove (Ha)	Erosi/Abrasi	Akresi/Sedimentasi
1.	Rembang	58,7	852,86	206,86
2.	Pati	138,5	514,99	1.458,26
3.	Jepara	82,6	938,73	445,78
4.	Demak	980,1	1.016,22	1.646,76

5.	Kota Semarang	62,9	342,67	318,74
6.	Kendal	224,3	317,44	1.005,85
7.	Batang	15,3	101,73	442,02
8.	Kota Pekalongan	1,5	0,24	350,69
9.	Kab.Pekalongan	13,7	77,06	76,89
10.	Pemalang	66,7	231,04	2.229,61
11.	Kota Tegal	47,4	33,64	1.224,04
12.	Kab.Tegal	33,4	24,98	274,39
13.	Brebes	836,3	2.115,39	1.905,29
14.	Cilacap	9.347,8	-	-
15.	Kebumen	30,8	-	-
16.	Purworejo	59,4	-	-
17.	Karimunjava	662,4	-	-
Total		12.661,6	6.566,97	12.585,19

Sumber:Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui total luasan ekosistem mangrove di Provinsi Jawa Tengah sebesar 12.661,6 ha dengan besaran tingkat erosi/abrasi mencapai 6.566,97 dan akresi/sedimentasi sebesar 12.585,19 ha. Wilayah Cilacap menjadi wilayah dengan luasan ekosistem mangrove terluas di Jawa Tengah yaitu 9.347,8 ha sementara itu wilayah Brebes menjadi wilayah yang ekosistem mangrovenya mengalami kerusakan paling parah yaitu erosi/abrasi mencapai 2.115,39 ha dan akresi/sedimentasi mencapai 2.905,29.

Demak menyusul dengan luasan erosi/abrasi parah mencapai 1.016,22 ha dan akresi/sedimentasi 1.646,76. Terakhir, wilayah penting yang berdekatan dengan Demak yang juga mengalami kerusakan ekosistem mangrove yaitu Kota

Semarang dengan luasan mangrove sebesar 62,9 ha kemudian terkena erosi/abrasi mencapai 342,67 ha dan akresi/sedimentasi sebesar 318,74 ha.

Selain erosi/abrasi dan akresi/sedimentasi, ternyata terdapat faktor lain yang menjadi ancaman bagi keberadaan ekosistem mangrove di Kota Semarang. Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 menjelaskan terdapat beberapa potensi ancaman untuk keberlangsungan ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kepemilikan lahan, pencemaran sampah dan limbah domestik, banjir rob dan abrasi, alih fungsi lahan, rencana pembangunan jalan tol dan tanggul laut.

Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas kebijakan perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut yaitu dengan indikasi program/kegiatan yang harus dilakukan dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kawasan Pesisir, penetapan baku kerusakan kawasan mangrove, serta pemantauan tutupan tajuk dan kerapatan pohon mangrove.

Lahan ekosistem mangrove yang tersebar di Kota Semarang berada di Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tugu. Berikut dibawah ini perubahan luas Mangrove Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024.

Tabel 1. 4 Perubahan Luas Mangrove Kota Semarang 2018 dan 2021

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	
		2018	2021

1	Genuk	32,99	4
2	Tugu	140,68	141
3	Semarang Barat	10,02	4,5
4	Semarang Utara	2,48	2,48
Total		186,17	151,98

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Luas ekosistem mangrove Kota Semarang pada tahun 2021 di empat kecamatan ternyata mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2018. Terdapat kecamatan yang mengalami penurunan luas mangrove secara signifikan yaitu Kecamatan Genuk yaitu pada tahun 2018 sebesar 32,99 ha dan di tahun 2021 hanya menjadi 4 ha saja. Disusul dengan Kecamatan Semarang Barat yang semula 10,02 ha mengalami penurunan menjadi 4,5 ha pada tahun 2021 dan kecamatan Semarang Utara berada di angka yang stagnan. Sementara itu, Kecamatan Tugu menjadi wilayah yang mengalami sedikit peningkatan yaitu pada tahun 2021 mencapai 141 ha dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 140,68 ha.

Kecamatan Tugu mempunyai tujuh kelurahan dengan total luas wilayah 28.13 dan beribukota di Kelurahan Tugurejo. Tugurejo merupakan salah satu kawasan dengan ketahanan pesisir yang baik menurut kondisi mangrovenya, hal ini berarti pengaruh tekanan berupa perubahan lahan yang berpengaruh ekosistem mangrove mengalami gangguan dapat berdampak pada perubahan fungsi dan struktur, akan tetapi ekosistem mangrove ini berpotensi dapat ke kondisi stabil kembali salah satunya yaitu Ekosistem Mangrove Tapak Tugurejo.

Kawasan Hutan Mangrove Tapak, yang luasnya mencapai sekitar 400 hektar dengan jutaan pohon mangrove, menjadi salah satu wilayah potensial di

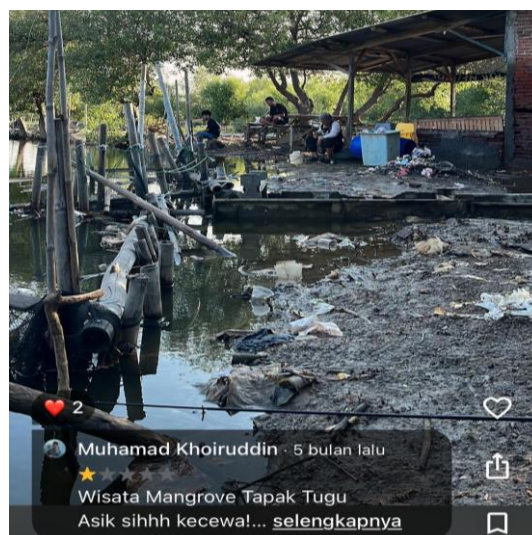
Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Semarang, terdapat lima jenis pohon mangrove yang ditanam di kawasan ini, antara lain *Avicennia Marina*, *Rhizophora Mucronata*, *Excoecaria Agallocha*, *Bruguiera Cylindrical*, dan *Xylocarpus Moluccensis*.

Kawasan Hutan Mangrove Tapak mempunyai sungai yang berada di tengah-tengah area tambak dan mengairi daerah mangrove tersebut dan memiliki panjang sejauh 3.050 km, lebar permukaan 6 meter, kedalaman 4 meter, dengan debit minimal 51 meter kubik/detik (Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024). Sayangnya, seiring berjalannya waktu sungai ini telah tercemar oleh limbah rumah tangga dan limbah industri di sekitar daerah tersebut.

Berdasarkan tingkat kualitas airnya, Sungai Tapak sudah tercemar yang di tes menggunakan parameter (*Dissolved Oxygen*) DO, (*Biological Oxygen Demand*) BOD, dan (*Chemical Oxygen Demand*) COD di mana tingkat limbah rumah tangga memiliki kandungan organik tinggi berupa *grey water* domestik. Kadar (*Biological Oxygen Demand*) BOD sebesar 24 mg/L mengindikasikan kualitas airnya berada di bawah ambang batas karena sekeliling Sungai Tapak Hulu merupakan pemukiman dan industri dan (*Chemical Oxygen Demand*) COD sebesar 50,71 mg/L menunjukkan kualitas air Sungai Tapak semakin menurun. Kemudian, Total Coliform mencapai 16.000.000 menunjukkan tingginya kandungan bakteri yang dihasilkan kegiatan domestik meliputi limbah *black water* sehingga menciptakan bakteri patogen lainnya seperti bakteri *Escherichia coli* yang menimbulkan gejala diare, muntah-muntah, kram perut, dan demam (Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024).

Limbah industri menjadi salah satu masalah lingkungan di Sungai Tapak yang mengairi area mangrove hal ini dipengaruhi adanya pabrik-pabrik yang dibangun sekitar Dusun Tapak. Perkembangan industri di Dusun Tapak, Kelurahan Tugurejo dimulai sekitar tahun 1970-an dengan adanya pabrik-pabrik besar yang dibangun, karena letaknya yang dekat dengan pantai dan adanya aliran dari Sungai Tapak yang digunakan sebagai saluran pembuangan limbah ke laut menyebabkan pertumbuhan industri di kawasan ini semakin pesat (Ningwuri, 2017). Berdasarkan hasil uji sampel air dan tinjauan ke industri, DLH Kota Semarang menilai bahwa meskipun industri telah memiliki IPAL, kinerjanya belum optimal, sehingga akumulasi limbah industri dan domestik di badan air sekitar muara sungai menjadi penyebab utama kematian massal ikan di tambak (Tirto.id, 2025).

Sungai Tapak beserta Ekosistem Mangrove Tapak juga tercemar akibat sampah yang menumpuk dan menyebar di aliran sungai dan area pohon mangrove. Ulasan dan rating *Google Maps* di bawah ini mengindikasikan Mangrove Tapak memiliki banyak sampah berserakan dimana-mana dan adanya pungutan tiket masuk liar dari pihak masyarakat sekitar.



Gambar 1. 3 Tumpukan Sampah di Ekowisata Mangrove Tapak

Sumber: *Google Maps* (2025)

Ancaman yang ada di Mangrove Tapak ternyata tidak hanya limbah industri dan sampah, akan tetapi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kepemilikan lahan juga menjadi ancaman. Menurut penelitian Siahaan, N.I, dkk (2020), pada tahun 2019 luas industri di Kecamatan Tugu mengalami peningkatan menjadi 59,75 ha dibandingkan tahun 2018 yaitu 42,317 ha sehingga mengalami perubahan sebesar 17,433 ha. Kemudian, penggunaan lahan untuk tambak justru berkurang tahun 2019 yakni 319,852 ha yang sebelumnya 328,095 ha pada tahun 2018.

Abrasi dan perubahan lahan telah berpengaruh pada keadaan ekosistem mangrove di Kota Semarang sehingga terjadi degradasi secara luas (Ermiliansa dalam Mirza, M, dkk, 2022). Pada mulanya, banyaknya kawasan mangrove dimanfaatkan sebagai tambak dan beralih menjadi kawasan terbangun seperti industri. Adanya kasus pencemaran, abrasi, dan pembangunan pabrik-pabrik di sekitar Dusun Tapak menyebabkan banyak warga yang menjual lahan tambaknya kepada pihak asing dan menyebabkan sebagian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh tani maupun nelayan beralih kerja menjadi buruh pabrik.

Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 menjelaskan bahwa di pesisir barat terdapat pengembangan kawasan industri besar Wijayakusuma di Kecamatan Tugu yang menjadi tantangan terhadap pengembangan ekosistem mangrove yang mana pengembangan kawasan industri tersebut berlokasi tepat di sebelah barat kawasan Mangrove Tapak yang dijadikan tempat wisata.

Industri Wijayakusuma memiliki luas 250 ha dengan luas yang telah digunakan sebesar 79 ha, luas yang tersedia sebesar 75 ha dan 96 ha dalam tahap rencana. Berbagai perusahaan yang termasuk dalam industri tersebut antara lain PT. *Apparel One* Indonesia, PT. *Fashion Product* Indonesia, dan lain sebagainya (Website DPMPTSP, 2025).

Terdapat berbagai industri di Kelurahan Tugurejo selain Industri Wijayakusuma yang juga menjadi ancaman bagi Mangrove Tapak, berikut di bawah ini daftar industri besar dan sedang di Kelurahan Tugurejo tahun 2023.

Tabel 1. 5 Daftar Industri Besar dan Sengah di Kelurahan Tugurejo Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Produk Utama
1.	Indofood CBP (Sukses Makmur) FS, PT	Kecap, Saos, dan Syrup
2.	Indofood Sukses Makmur Unit Ingradient	Bumbu dan Minyak Olahan
3.	Jadi Jaya Makmur, CV	Crum Rubber Karet
4.	Jamu Borobudur, PT (Unit Ekstraksi)	IEBA (Industri Ekstrak Bahan Alam/Jamu)
5.	Karya Cipta Nyata Wisesa, PT	Sirup
6.	Marie Albert Indonesia, PT	Mebel dari kayu

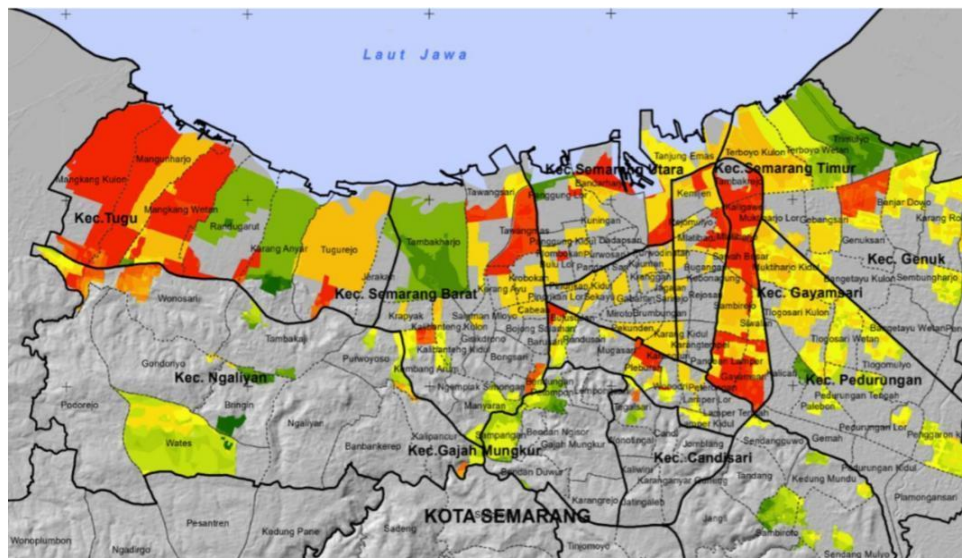
Sumber: BPS Kota Semarang (2023)

Tekanan pembangunan juga muncul dari wilayah Kendal yaitu terdapat kegiatan reklamasi dan pembangunan industri kayu lapis yang turut berdampak buruk pada kondisi pesisir barat Kota Semarang. Kegiatan reklamasi diduga mengambil pasir dari wilayah Kota Semarang sehingga memicu mundurnya garis pantai wilayah barat Kota Semarang. Kegiatan Industri KIK Kendal diduga memperburuk kondisi lingkungan yang disebabkan oleh penyebaran limbah dari

pabrik oleh arus laut yang mengganggu ekosistem mangrove dan perikanan wilayah tersebut.

Selain permasalahan sampah, limbah rumah tangga, limbah pabrik, pengembangan industri Wijayakusuma dan kegiatan reklamasi yang telah disebutkan, banjir juga menjadi salah satu faktor signifikan yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove di Dusun Tapak. Berdasarkan hasil analisis dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Semarang (2023), Kecamatan Tugu memiliki potensi luas bahaya banjir rendah sebesar 646,96 ha, sedang sebesar 739,15 ha, tinggi sebesar 3.373,85 dengan total mencapai 2.217,24 ha yang diklasifikasikan sebagai kecamatan kelas bahaya banjir tinggi di Kota Semarang.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Kota Semarang (2019) memaparkan Kelurahan Tugurejo yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tugu juga merupakan daerah rawan bencana banjir di Kota Semarang. Selanjutnya, dikutip dari berita Samudrafakta, berdasarkan peta rawan bencana banjir BPBD Kota Semarang (2024) di bawah ini, mengindikasikan Kelurahan Tugurejo yang ditandai dengan warna kuning tergolong ke dalam ancaman bencana banjir sedang. Sementara itu, kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangunharjo yang juga berada di Kecamatan Tugu berwarna merah yang mencerminkan daerah tersebut tergolong dalam ancaman bencana banjir tinggi. Dan yang terakhir, Kelurahan Randugarut dan Kelurahan Karang Anyar berwarna hijau yang berarti tergolong ancaman bencana banjir rendah.



Gambar 1. 4 Daftar Daerah Rawan Banjir di Kota Semarang

Sumber: Berita SamudraFakta (2024)

Banjir yang sering terjadi terutama selama musim hujan telah memperparah kondisi ekosistem mangrove dengan membawa material sedimentasi dan polutan yang mengancam kelangsungan hidup tanaman mangrove. Banjir juga merusak akar mangrove dan mempengaruhi kemampuan tanaman tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Sementara itu, abrasi juga menjadi ancaman bagi Kelurahan Tugurejo. Menurut hasil analisis dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Semarang (2023), Kecamatan Tugu mempunyai potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi rendah sebesar 25,07 ha ; abrasi sedang sebesar 45,09 ha ; abrasi tinggi sebesar 77,18 ha dengan total mencapai 147,34 ha yang diklasifikasikan sebagai kecamatan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tinggi di Kota Semarang.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat guna melindungi kawasan ini.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pencemaran air akibat pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga menyebabkan penurunan kualitas air di kawasan Sungai Tapak dan ekosistem mangrove
2. Polusi sampah yang menumpuk merusak fungsi dan estetika ekosistem mangrove
3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kepemilikan lahan menyebabkan alih fungsi lahan mangrove menjadi industri karena sebagian besar dimiliki pihak swasta
4. Reklamasi dan pengembangan kawasan Industri Wijayakusuma memperparah degradasi ekosistem mangrove
5. Banjir rob dan abrasi yang berdampak pada mundurnya garis pantai dan kerusakan biofisik pesisir, hilang atau rusaknya ekosistem mangrove serta kerugian sosial masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang dikemukakan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang?

2. Apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mempelajari suatu permasalahan dan mampu memberikan kontribusi wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang difokuskan pada pengelolaan ekowisata mangrove dengan teori peran *stakeholders* sehingga dapat memperdalam pemahaman tentang koordinasi, partisipasi, dan peran berbagai pihak dalam pengelolaan ekowisata mangrove.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas wawasan penulis mengenai peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi, wawasan dan menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang akan meneliti fokus penelitian yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kota Semarang terkait dengan kondisi peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada masyarakat tentang peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Diharapkan hal ini juga dapat mendorong masyarakat keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan potensi wisata Mangrove Tapak, Kota Semarang ke arah yang lebih baik.

1.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Tujuan	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Loetty Wahyuningtiyas dan Doddy Aditya Iskandar (2023) Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen	Mengidentifikasi peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan (Taman Wisata Alam Kawah Ijen) TWAKI	Teori stakeholder menurut Reed <i>et al.</i> (2009) <i>stakeholder</i> terdiri atas empat kelompok yaitu <i>key players, context setters, subjects</i> , dan <i>crowd</i> Peran stakeholder menurut Wahyuningtiyas, L., & Iskandar, D. A. (2023) yaitu <i>policy creator, implementer, fasilitator, dan konservator</i> yang diperjelas dalam penelitian terdahulu terkait peran stakeholder (Nugroho, H.N. Zauhar & Suaryadi, 2014) yaitu <i>policy creator, coordinator, implementor, fasilitator, dan accelerator</i> dan peran <i>stakeholder</i> (Mustafa & Marsoyo 2020) terdiri atas <i>policy creator, planner, fasilitator, implementer, researcher</i> .	Kualitatif	Pengelolaan wisata alam Kawah Ijen memiliki empat peran <i>stakeholder</i> antara lain <i>policy creator, implementer, fasilitator, dan konservator</i>
2.	Fernando Martin Y. Roxas John Paolo R. Rivera, Eylla Laire M. Gutierrez (2020) <i>Mapping stakeholders' roles in</i>	Mengetahui bagaimana para stakeholder pariwisata berinteraksi dan bermanfaat dalam mencapai	Pendekatan tata kelola menurut Bramwell dan Lane (2011) serta analisis menurut Dos Anjos dan Kennell (2019) terkait literatur tata kelola pariwisata yang diklasifikasikan menjadi 4 yaitu pergeseran peran pemerintah, munculnya jaringan, bentuk tata kelola yang kompleks dan perubahan peran organisasi dan pelaku	Kajian literatur sistematis (<i>Systematic Literature Review/SLR</i>) dan	Keberhasilan pengelolaan wisata berkelanjutan bergantung pada efektivitas tata kelola dan keterlibatan stakeholder. Studi ini

	<i>governing sustainable tourism destinations</i>	keberlanjutan tata kelola pariwisata	manajemen.	menggunakan kerangka sistem sosial-ekologis (<i>Social-Ecological Systems-SES</i>)	mengembangkan lima poin kerangka kerja metode stakeholder dalam mengoptimalkan peran mereka bidang konservasi, regulasi, penciptaan lapangan kerja dalam mendukung keberlanjutan pariwisata.
3.	Ni Ketut Anindita Meutiasari Kismartini Kismartini dan Retna Hanani (2024) Urgensi Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Sampah	Urgensi peran stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah	Teori <i>stakeholder</i> menurut Nugroho (2020), peran stakeholder diklasifikasikan menjadi lima, yaitu <i>policy creator, coordinator, implementor, facilitator, dan accelerator</i>	Kualitatif	Peran seluruh <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sampah berbeda antara satu dengan yang lain seperti sebagai <i>policy creator, coordinator, implementor, facilitator, dan accelerator</i>
4.	Feyisetan Leo-Olagbaye, Henry Odeyinka, dan Pavithra Rathnasiri (2023) <i>Stakeholders Roles in the Delivery of Sustainable Housing Projects in Lagos</i>	Penilaian peran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proyek perumahan berkelanjutan di Negara Bagian Lagos, Nigeria	Teori <i>stakeholders</i> menurut R. Edward Freeman (1984) yang menyatakan serta mendefinisikan pihak pemangku kepentingan menentukan kinerja organisasi maupun sebaliknya	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang terlibat telah menyadari peran mereka dalam proyek perumahan berkelanjutan di Lagos. Tingkat kesadaran berbeda-beda di antara

	State, Nigeria				kelompok yang satu dengan yang lain, serta pemerintah dan manager memiliki peran penting sebagai stakeholder kunci dalam keberhasilan proyek perumahan berkelanjutan
5.	Juliana Goncalves Machado, Gabriela Buccini, Elisabetta Recine (2023) <i>An Analysis of Key Actor Networks for Scale-Up Strategies for Childhood Obesity Prevention and the Care of Children with Obesity in Brazil</i>	Analisis kekuatan hubungan antara aktor kunci dan <i>Opinion Leaders</i> (OL) yang mempengaruhi peningkatan strategi Brasil dalam mengatasi pencegahan obesitas anak di tingkat federal dan negara bagian/kota (lokal).	Ilmu Implementasi menurut Implementation on Science dan mengimplementasikan metode Net-Map untuk mengidentifikasi aktor kunci dengan <i>Opinion Leaders</i> (OL) yang mempengaruhi peningkatan strategi Brasil mengatasi obesitas anak.	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan terdapat 121 aktor kunci federal dan 63 aktor kunci lokal dimana masing-masing diidentifikasi sebagai OL sebanyak 62 dan 28 orang. Kemudian, domain penguasa mempunyai jumlah aktor kunci terbanyak dan domain keuangan mempunyai peran sedikit. Sektor kesehatan muncul sebagai Opinion Leader (OL) di seluruh domain kekuasaan.
6.	Fahad Mursyid Jannata, Aufarul	Mengidentifikasi <i>stakeholders</i>	Teori Pentahelix menurut Arif Yahya dalam (Tri Yuningsih, 2019)	Kualitatif	Implementasi kebijakan pengembangan

	Marom dan Herbasuki Nurcahyanto (2023) Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	dalam implementasi kebijakan, pengembangan pariwisata, analisis peran <i>stakeholders</i>, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo	Teori identifikasi <i>stakeholder</i> menurut Viney (dalam Suwitri, 2011) Teori <i>stakeholder</i> menurut Nugroho (dalam Handayani, 2017)		pariwisata di Desa Wisata Jatirejo terdiri dari lima <i>stakeholders</i> dengan model Pentahelix. Analisis identifikasi <i>stakeholders</i> menurut tingkat pengaruh dan kepentingan lalu dikelompokkan antara lain primer, sekunder, tersier, dan kwarter (tidak ditemukan <i>stakeholders</i>). Peran <i>stakeholder</i> diklasifikasikan menjadi lima dan faktor pendukung dan penghambat terdiri atas indikator nilai, komunikasi, kepercayaan dan kebijakan
7.	Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini (2022) Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan	Menganalisis peran <i>stakeholders</i> beserta faktor pendorong dan penghambat dalam	Teori <i>stakeholder</i> menurut (Nugroho et al., 2014), peran <i>stakeholder</i> diklasifikasikan menjadi lima, yaitu <i>policy creator</i>, <i>coordinator</i>, <i>implementor</i>, <i>facilitator</i>, dan <i>accelerator</i> Teori <i>Collaborative Governance</i> menurut (Ansell & Gash, 2008)	Kualitatif	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit antara lain Pokdarwis Kandang Gunung, Dinas

	Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang	pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang			Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kelurahan Nongkosawit, Bappeda Kota Semarang, Dinas Disporapar Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Universitas Negeri Semarang, Dinas Pariwisata, dan masyarakat Nongkosawit dan terdapat lima peran <i>stakeholder</i> . Hubungan antar stakeholder belum optimal yang sehingga menghambat pengembangan Desa Wisata Nongkosawit.
8.	Beny Setiawan, Herbasuki Nurcahyanto (2020) Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu	Menganalisis dan mengidentifikasi peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan	Teori klasifikasi <i>stakeholders</i> menurut Maryono <i>et al.</i> dalam Latupapua 92015: 25) antara lain <i>stakeholders</i> primer, <i>stakeholders</i> kunci dan <i>stakeholders</i> sekunder. Teori <i>stakeholders</i> menurut Bryson (2004) yaitu <i>Key Player</i> , <i>Subject</i> , <i>Crowd</i> dan <i>Context Setter</i> Teori <i>stakeholder</i> menurut (Nugroho et al., 2014), peran stakeholder diklasifikasikan menjadi lima, yaitu <i>policy creator</i> , <i>coordinator</i> , <i>implementor</i> , <i>facilitator</i> , dan <i>accelerator</i>	Kualitatif	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam penelitian ini antara lain Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai <i>stakeholder</i> kunci dimana berperan sebagai <i>policy creator</i> , fasilitator, akselerator dan koordinator.

	Studi Kasus Kecamatan Kota Pedurungan Kota Semarang	Pedurungan Kota Semarang			Kemudian, <i>stakeholders</i> primer terdiri atas tenaga kesehatan (bidan) berperan sebagai fasilitator, implementer, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator. Yang terakhir, kecamatan, kelurahan, RT,RW, keluarga, institusi pendidikan dan dunia usaha sebagai <i>stakeholders</i> sekunder dan berperan sebagai fasilitator.
9.	Masyhurah, Tri Yuniningsih, Ida Hayu DM (2021) ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> , menganalisa peran <i>stakeholder</i> , serta mengetahui faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> .	Teori <i>stakeholders</i> menurut Ardianto (2008:124) yaitu <i>stakeholder</i> internal dan <i>stakeholder</i> eksternal Teori <i>stakeholders</i> menurut (Maryono et.al.2005) dalam penelitian (Yosevita:25) antara lain <i>stakeholders</i> primer, <i>stakeholders</i> kunci, <i>stakeholders</i> sekunder Teori <i>stakeholder</i> menurut Nugroho (2014:16-17) dalam penelitian Mahfud, M. A. Z. (2015),	Kualitatif	<i>Stakeholder</i> internal dan <i>stakeholder</i> kunci dari penelitian ini adalah DP3A yang berperan sebagai <i>policy creator</i> , <i>coordinator</i> , <i>implementor</i> , <i>facilitator</i> , dan <i>accelerator</i> . <i>Stakeholder</i> internal dan

	ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG		peran <i>stakeholder</i> diklasifikasikan menjadi lima, yaitu <i>policy creator</i> , <i>coordinator</i> , <i>implementor</i> , <i>facilitator</i> , dan <i>accelerator</i> .		<i>stakeholder</i> primer terdiri atas PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA berperan sebagai <i>coordinator</i> , <i>implementor</i> , <i>facilitator</i> , dan <i>accelerator</i> . Sementara itu, <i>stakeholder</i> eksternal dan <i>stakeholder</i> sekunder terdiri atas OPD, RDRM, PKK, LSM/NGO, rumahsakit,akademisi/un iversitas, Unit PPA Polrestabes Semarang, dan Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator dan akselerator perlindungan anak. Faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, diskriminasi korban, budaya masyarakat dan aspek regulasi.
10.	Mohamad Mirza, Sutrisno Anggoro dan	Mengidentifikasi potensi dan	Matriks analisis SWOT kemudian menggunakan metode <i>Analytical Hierarchi</i>	Deskriptif eksploratif	Terdapat lima (5) atraksi dalam objek wisata

	Fuad Muhammad (2022) Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Tapak Kelurahan Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah	strategi pengembangan Ekowisata Mangrove Tapak Tugurejo Semarang	<i>Process (AHP)</i>		ekosistem mangrove Tapak seperti menara pandang, penanaman mangrove, susur sungai, spot mancing dan pulau tirang yang membutuhkan pengembangan dan kepedulian dari pemerintah, pengelola dan masyarakat sekitar. Menurut hasil analisis SWOT, terdapat 3 strategi yaitu melakukan pendanaan, pembuatan sarana informatif, dan promosi tempat wisata serta edukasi fungsi mangrove.
--	---	---	-----------------------------	--	---

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Loetvy Wahyuningtiyas dan Doddy Aditya Iskandar (2023) yang berjudul “*Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen*” mengambil fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian lainnya oleh Fernando Martin Y. Roxas, dkk (2020) yang berjudul “*Mapping stakeholders’ roles in governing sustainable tourism destinations*” mengambil fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan tentang pemetaan peran pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus di Philipina. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Anindita Meutiasari, dkk (2024) yang berjudul “*Urgensi Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah*” meneliti fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan tentang peran dari para *stakeholders* yang terlibat dalam suatu program. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus pengelolaan sampah. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Feyisetan Leo-Olagbaye, dkk (2023) yang berjudul “*Stakeholders Roles in the Delivery of Sustainable Housing Projects in*

Lagos State, Nigeria” mengambil fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu program. Perbedaannya penelitian ini meneliti lokus proyek perumahan berkelanjutan di Negara Bagian Lagos, Nigeria. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan meneliti lokus pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Goncalves Machado, dkk (2023) yang berjudul “*An Analysis of Key Actor Networks for Scale-Up Strategies for Childhood Obesity Prevention and the Care of Children with Obesity in Brazil*” mengambil fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran pemangku kepentingan/jaringan aktor yang terlibat dalam suatu program. Perbedaannya penelitian ini meneliti lokus pencegahan obesitas anak di Brasil. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan meneliti lokus pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian oleh Fahad Mursyid Jannata, dkk (2023) yang berjudul “*Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*” mengambil fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Annatasya Yunita Nugroho, dkk (2022) yang berjudul “*Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang*” meneliti fokus yang sama dengan penelitian yang

akan dilakukan mengenai peran *stakeholders* dalam pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Beny Setiawan, Herbasuki Nurcahyanto (2020) yang berjudul “*Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” mengambil fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan tentang peran *stakeholders* dalam suatu program. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Masyhurah, dkk (2021) yang berjudul “*ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG*” meneliti fokus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan tentang peran *stakeholders* dalam suatu program. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus pengelolaan ekowisata mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Mirza, dkk (2022) yang berjudul “*Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Tapak Kelurahan Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah*” mengambil lokus yang sama dengan penelitian yang akan

dilakukan yaitu di Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Perbedaan penelitian ini mengambil fokus mengenai strategi pengembangan Ekowisata Mangrove Tapak. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil fokus mengenai peran *stakeholders* pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Administrasi Publik

Kata administrasi berakar dari kata "*ad*" dan "*minster*" yang memuat makna *to serve*, artinya proses pelayanan. Manusia merupakan modal administrasi sebab manusia adalah sumber adanya administrasi (Dimock and Dimock dalam Djani, W (2022). Administrasi didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengatur seluruh kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rahman dalam Andriani, R., 2023). Kemudian, publik didefinisikan sebagai *civil society* atau masyarakat warga (Immanuel Kant dalam Djani, W., 2022). Administrasi publik merujuk pada proses kerja sama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan publik (Zauhar dalam Djani, W., 2022). Administrasi publik adalah kombinasi teori dan praktek untuk menyalurkan pemahaman terhadap pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat supaya kebijakan publik lebih responsif pada kebutuhan publik (Henry dalam Djani, W., 2022).

Dengan demikian, administrasi publik adalah disiplin ilmu yang multidimensional, meliputi pelaksanaan kebijakan publik, manajemen sumber daya, interaksi dengan masyarakat dan melibatkan peran penting dari pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik.

1.7.2. Paradigma Administrasi Publik

a) Paradigma I: Paradigma Dikotomi dan Administrasi (1900-1926)

Pada paradigma pertama menekankan administrasi publik harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai dan dipisahkan dari politik supaya dapat berfungsi secara efisien dan profesional. Politik menitikberatkan pada perumusan kebijakan (*policy making*) didasarkan kebutuhan masyarakat sedangkan administrasi bertanggung jawab atas implementasi kebijakan secara netral tanpa adanya intervensi kepentingan politik.

b) Paradigma II: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Pada paradigma ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip administrasi antara lain POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Lokus dari paradigma ini kurang ditekankan sebab esensi prinsip tersebut dapat digunakan secara global yang artinya dapat terjadi di seluruh tatanan dan aspek kehidupan.

c) Paradigma III: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada paradigma ini, administrasi negara dianggap sebagai bagian dari ilmu politik, karena kebijakan publik dan administrasi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi sehingga batas antara administrasi dan politik menjadi semakin kabur dan prinsip-prinsip administrasi publik menjadi sulit dipahami.

d) Paradigma IV: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma empat muncul sebagai reaksi terhadap paradigma sebelumnya yang terlalu menitikberatkan hubungan antara administrasi

negara dan politik. Paradigma ini fokus pada prinsip-prinsip administrasi dan diterapkan dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Terdapat dua arah utama dalam perkembangan paradigma ini, yaitu didasarkan berbagai disiplin ilmu dan fokus pada kebijakan publik.

e) Paradigma V: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Paradigma kelima merupakan pembaharuan dari paradigma sebelumnya sebagai reaksi terhadap dominasi pendekatan ilmu politik dalam studi administrasi negara dengan berfokus pada efektivitas birokrasi, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan. Sementara itu, lokusnya pada permasalahan publik dan birokrasi pemerintahan.

f) Paradigma VI: Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma keenam administrasi publik sebagai *governance* muncul akibat pergeseran konsep “*government*” ke konsep “*governance*” dan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam upaya menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Paradigma ini berlandaskan pada keseimbangan hubungan antara tiga pilar antara lain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang harus beriringan secara selaras. *Governance* bukan lagi sekadar bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, tetapi bagaimana berbagai aktor bekerja sama dalam menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan keenam paradigma di atas, paradigma yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan ini termasuk dalam paradigma keenam yaitu Paradigma Administrasi Publik sebagai *Governance* yang di dalamnya

mengandung kepentingan publik melibatkan tiga aktor meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya pemenuhan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang menjelaskan analisis peran *stakeholders* dalam suatu kegiatan pemerintah dengan menjalin kolaborasi kerja sama antar *stakeholders*. Penelitian ini tidak hanya sebatas menganalisis peran *stakeholders* dari pihak pemerintah saja, namun juga sektor non-pemerintah.

1.7.3. Manajemen Publik

Manajemen publik yang muncul sebagai sebuah keilmuan pada dasarnya berakar dari pemikiran yang sederhana. Suatu organisasi sektor publik diatur oleh manajer yang berperan mengatur berbagai hal dalam organisasi tersebut maka studi tentang bagaimana manusia menjalankan manajemen terhadap organisasi sektor publik inilah yang selanjutnya disebut manajemen publik.

Laurence Lynn (1996) menggambarkan manajemen publik sebagai seni, ilmu, dan profesi dalam pengelolaan organisasi publik. Manajemen publik sebagai seni dipahami aktivitas kreatif yang melibatkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan strategi dalam menghadapi dinamika sosial serta politik. Kemudian, manajemen publik sebagai ilmu didasarkan pada teori, metode, dan prinsip-prinsip sistematis. Sementara itu, manajemen publik sebagai profesi mengacu pada sekelompok orang mengabdikan dirinya pada ilmu ini. Dengan demikian, manajemen publik adalah disiplin yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam administrasi pemerintahan serta pelayanan publik.

Kaitannya dengan pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang yaitu implementasi manajemen kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan upaya yang dilakukan dan melibatkan berbagai aktor yang berperan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sehingga konsep manajemen publik membantu dalam memahami bagaimana *stakeholders* bekerja sama dalam perumusan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, serta pemecahan konflik yang mungkin muncul dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

1.7.4 Governance

Secara umum, *governance* merujuk pada cara pengelolaan urusan publik yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Konsep ini muncul sebagai respons atas keterbatasan model pemerintahan tradisional (*government*) yang bersifat hierarkis dan terpusat, sehingga *governance* menekankan pola interaksi, koordinasi, dan kolaborasi antaraktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

World Bank (1992) mendefinisikan *governance* sebagai cara kekuasaan digunakan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk tujuan pembangunan. Definisi ini menekankan aspek pengelolaan kewenangan publik serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997) memaknai *governance* sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif dalam

mengelola urusan negara di berbagai tingkatan, yang mencakup mekanisme, proses, dan institusi tempat kepentingan publik disalurkan.

Rhodes (1996) memandang governance sebagai pergeseran dari *government* menuju pola jaringan (*network governance*), di mana pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang dominan, melainkan berperan sebagai koordinator dalam jaringan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor yang saling bergantung. Pandangan ini diperkuat oleh Kooiman (2003) yang menyatakan bahwa *governance* merupakan pola interaksi antara aktor publik dan non-publik dalam menghadapi permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh negara. Dengan demikian, governance dapat dipahami sebagai suatu proses pengelolaan publik yang menekankan keterlibatan multi-aktor, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan partisipatif dalam mencapai tujuan bersama.

1.7.5. Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan salah satu pendekatan penting dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu maupun kelompok dalam struktur sosial tertentu. Secara umum, teori peran memandang bahwa perilaku seseorang tidak muncul secara acak, melainkan dibentuk oleh seperangkat harapan, norma, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi sosial yang dimilikinya (Biddle, 2021).

Scott dan Davis (2023) menyatakan peran mencerminkan pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial terhadap individu yang menempati posisi

tertentu dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Oleh karena itu, peran tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan struktur sosial yang mengaturnya. Katz dan Kahn (2021) menjelaskan peran terbentuk melalui proses interaksi sosial, di mana individu menyesuaikan perilakunya dengan harapan pihak lain yang berkepentingan. Ketika ekspektasi tersebut dipahami dan dijalankan secara konsisten, maka peran dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keteraturan sosial maupun organisasi.

Lebih lanjut, teori peran juga mengakui adanya potensi ketegangan dalam pelaksanaan peran. Menurut Conway dan Briner (2022), individu dapat mengalami konflik peran (*role conflict*) atau ketidakjelasan peran (*role ambiguity*) ketika tuntutan peran tidak selaras atau tidak didefinisikan secara jelas. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran serta kualitas interaksi antarindividu dalam suatu sistem sosial.

Dalam konteks kelembagaan dan organisasi, teori peran sering digunakan untuk memahami pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor. Chen, Zhong, dan Lam (2023) menyatakan bahwa kejelasan peran berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan koordinasi, karena setiap aktor memahami batas kewenangan serta tanggung jawabnya.

1.7.6. Stakeholders

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah sekelompok orang atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu permasalahan (Schiller et al., dalam Pellecchia, M., dkk., 2022). *Stakeholders* terdiri dari berbagai individu atau kelompok dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dan dapat

memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan hasil implementasi. *Stakeholder* kebijakan meliputi seluruh pihak yang berkepentingan dan berkontribusi pada setiap tingkatan siklus pengembangan kebijakan (Palmar, dkk (2010) dalam (Abidin, C., dkk., 2024).

Definisi lain *stakeholder* yaitu individu, organisasi, maupun kelompok yang mempunyai fokus pada sumberdaya atau output organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut (Brysson dalam Masyhurah, dkk., 2021). *Stakeholder* mempunyai potensi untuk dipengaruhi atau mempengaruhi pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas (Kismartini et al., dalam Meutiasari, N. K. A., dkk., 2024). Secara keseluruhan, *stakeholder* didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, keterlibatan, serta potensi untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kebijakan, program, atau aktivitas tertentu.

1.7.7. Peran Stakeholders

Keterlibatan *stakeholders* menjadi faktor kunci keberhasilan suatu program karena setiap pihak memiliki kontribusi dan peran yang berbeda sesuai kapasitasnya. Peran tersebut dapat meliputi penyusunan regulasi, fasilitasi sumber daya, hingga pelaksanaan dan pengelolaan secara langsung.

1.7.7.1 Peran *Stakeholders* menurut Wahyuningtiyas dan Iskandar

Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnalnya, Wahyuningtiyas dan Iskandar (2023) mengungkapkan peranan *stakeholders* terdiri atas empat, antara lain policy creator, implementer, fasilitator, dan konservator yang mana peran konservator menjadi temuan dalam penelitiannya yang dapat menjadi kontribusi teoritik.

a) Peran policy creator

Stakeholders berperan sebagai policy creator dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan arah strategis pengelolaan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu program. Peran ini mencakup penetapan aturan, tujuan, serta kerangka kerja pengelolaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi aktor lain dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip keberlanjutan

b) Peran implementer

Sebagai implementer, *stakeholders* bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan operasional di lapangan, seperti pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan teknis agar tujuan pengelolaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

c) Peran fasilitator

Peran fasilitator dijalankan dengan memberikan dukungan berupa pendampingan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta menjembatani kerja sama antar-pihak. Melalui peran ini, *stakeholders* mendorong partisipasi dan keterlibatan aktor lain agar proses pengelolaan dapat berjalan secara kolaboratif.

d) Peran konservator

Peran konservator merupakan temuan penting dalam penelitian Wahyuningtiyas dan Iskandar (2023) yang menjadi kontribusi teoritik, yaitu peran *stakeholders* dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber daya serta lingkungan secara berkelanjutan. Peran ini menekankan tanggung jawab

stakeholders tidak hanya pada aspek kebijakan dan pelaksanaan, tetapi juga pada upaya perlindungan ekosistem agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

1.7.7.2 Peran *Stakeholders* menurut Mathis

Mathis dalam Pramesti dkk., (2024) menyebutkan terdapat tiga peran *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program, yaitu:

1. Regulator adalah pihak yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan menetapkan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata.
2. Fasilitator adalah pihak yang berperan memberikan bantuan serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai target dalam pengembangan sektor pariwisata di suatu wilayah.
3. Pelaksana atau pengelola adalah pihak yang bertugas menjalankan sekaligus mengelola destinasi wisata.

1.7.7.3 Peran *Stakeholders* menurut Nugroho

Nugroho (2014) mengelompokkan peran stakeholders dalam proses kebijakan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

1. Policy Creator adalah pihak yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis untuk mengarahkan jalannya program atau kegiatan.
2. Koordinator adalah pihak yang bertugas mengatur sinergi, menyatukan visi, serta mengharmoniskan langkah antar pihak terkait.
3. Fasilitator adalah pihak yang menyediakan dukungan, sumber daya, dan kemudahan bagi para pelaksana untuk mencapai tujuan.

4. Implementor adalah pihak yang melaksanakan kebijakan atau program secara langsung di lapangan.
5. Akselerator adalah pihak yang mendorong percepatan pencapaian tujuan melalui inovasi, terobosan, atau percepatan proses pelaksanaan.

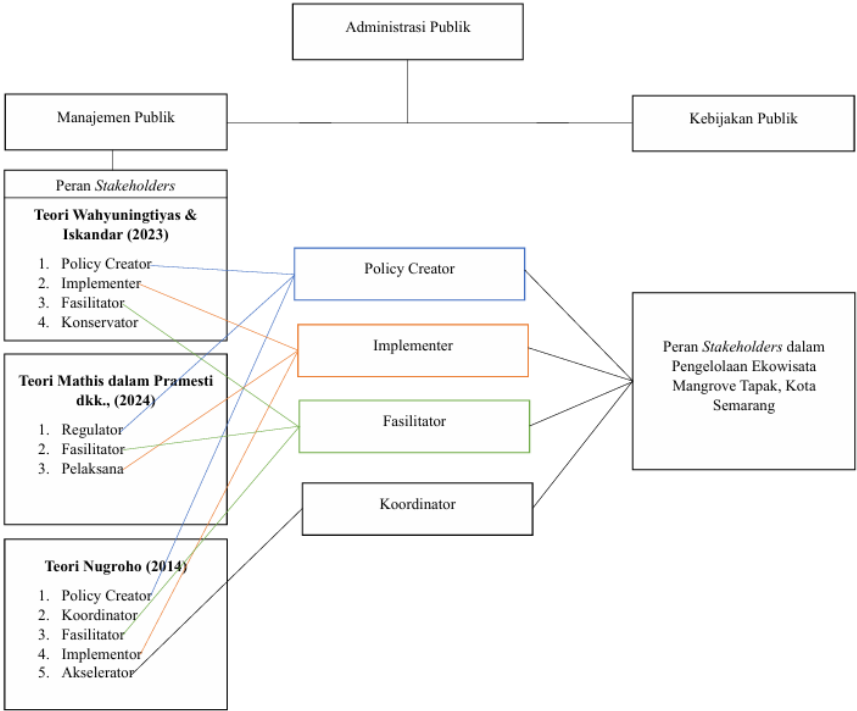
1.7.8. Ekowisata Mangrove

Ekowisata (*ecotourism*) adalah wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kunjungan ke daerah alami yang relatif tidak terganggu, menikmati dan menghargai alam serta terdapat aspek budaya baik di masa lalu maupun masa kini yang mempromosikan konservasi, mempunyai dampak negatif kecil terhadap pengunjung, memberikan kontribusi sosial ekonomi dan menguntungkan masyarakat sekitar (*The World Conservation Union* dalam Hussain, I., 2022). Ekowisata bertujuan pada pembangunan secara berkelanjutan jangka panjang (Whitelaw dalam Xu, et al, 2023). Definisi lain ekowisata adalah jenis pariwisata yang melindungi lingkungan, meningkatkan manfaat masyarakat lokal, dan mencakup pendidikan (Bjork dalam Dinç, et al., 2023). Sementara itu, mangrove adalah pohon, semak, palm, atau pakis tanah yang mempunyai tinggi lebih dari setengah meter di atas permukaan laut rata-rata di zona intertidal di pinggiran muara sungai (Duke dalam Das, et al, 2020).

Ekowisata mangrove menekankan partisipasi masyarakat dalam setiap program pengembangan mangrove, mulai dari tahap pembibitan, penanaman, pemantauan, hingga evaluasi (Prasadj, H., & Yerik A. S., 2022). Ekowisata di kawasan hutan mangrove dianggap mampu bersinergi dengan upaya konservasi

ekosistem hutan sehingga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan secara nyata (Mulyadi dalam Mukhlisi, 2017). Secara keseluruhan, ekowisata mangrove adalah bentuk pariwisata berbasis alam yang berfokus konservasi ekosistem hutan mangrove, memberikan manfaat edukatif dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

1.8. Kerangka Penelitian



Gambar 1. 5 Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

1.9. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merujuk pada konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian dimana memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur sehingga digunakan oleh peneliti untuk mempermudah melakukan sebuah analisis dalam penelitian.

Konsep	Fenomena	Gejala
Peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang adalah pembagian fungsi dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan yang dirumuskan pada Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Perda Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	Peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan
		Pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir
		Kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal
		Pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan
Faktor pendorong dan penghambat peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang Policy Creator adalah peran perumusan kebijakan dan aturan teknis Implementer adalah aktor pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitator adalah peran penyediaan sumber daya Koordinator adalah peran untuk koordinasi, kemitraan dan kerja sama	Policy Creator	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan
	Implementer	Pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir
	Fasilitator	Kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal
	Koordinator	Pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan

1.9.1 Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang

Peran *stakeholders* adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai pemangku kepentingan sebagai aktor utama dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Peran *stakeholders* terdiri atas peran policy creator, peran implementer, peran fasilitator, dan peran koordinator. Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang sebagai bentuk upaya pelestarian wilayah pesisir dan berkelanjutan dijabarkan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan
 2. Pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir
 3. Kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal
 4. Pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan
- Peneliti akan melihat bagaimana para *stakeholders* menjalankan perannya dalam hal ini.

1.9.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran *stakeholders* adalah faktor pendukung dan penghambat yang berdampak pada seluruh aspek pengelolaan ekowisata mangrove Tapak, Kota Semarang. Kemudian, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana temuan-temuan informasi tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Faktor pendukung dalam penelitian ini dipahami sebagai seluruh kondisi, sumber daya, kebijakan, serta bentuk dukungan yang berasal dari berbagai stakeholders yang berperan dalam memperlancar dan mengoptimalkan

pelaksanaan pengelolaan ekowisata mangrove Tapak. Sebaliknya, faktor penghambat diartikan sebagai berbagai kondisi atau kendala yang berpotensi menghambat efektivitas peran *stakeholders* dalam pengelolaan ekowisata mangrove Tapak.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang dapat dilihat dari para *stakeholders* dalam menjalankan perannya, antara lain:

1. Peran policy creator

Peran policy creator menjelaskan bagaimana perumusan kebijakan dan aturan teknis, integrasi kebijakan lintas sektor, penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

2. Peran implementer

Peran implementer merujuk pada keterlibatan *stakeholders* dalam Pelaksanaan program dan kegiatan, penerapan kebijakan di lapangan, pelaksanaan teknis pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

3. Peran fasilitator

Peran fasilitator menunjukkan kontribusi *stakeholders* dalam pemanfaatan sumber daya dan penyediaan dukungan sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

4. Peran koordinator

Peran koordinator menggambarkan peran *stakeholders* dalam membangun kolaborasi, kemitraan dan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

1.10. Argumen Penelitian

Mangrove merupakan ekosistem yang sangat beragam dan menyediakan berbagai manfaat ekosistem bagi masyarakat lokal dan global, akan tetapi keberadaan mangrove diperkirakan akan terus menurun karena berbagai faktor pemicu seperti penggundulan hutan, polusi, dan perubahan iklim (Su, *et al.*, 2021). Dengan demikian, diperlukan keterlibatan *stakeholders* yang dilakukan secara optimal dalam pengelolaan ekosistem mangrove. *Stakeholders* berperan penting dalam kegiatan pengelolaan mangrove, mengingat *stakeholders* sebagai pelaku pembangunan dan pengguna sumber daya alam (Joandani dalam Kalsum, *et al.*, 2022). Adapun salah satu ekosistem mangrove di Kota Semarang yang membutuhkan peran *stakeholders* yang lebih optimal yaitu ekowisata mangrove Tapak. Akan tetapi, peran *stakeholders* pada Ekowisata Mangrove Tapak tersebut belum dilakukan secara optimal.

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif mengacu pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dengan mempertimbangkan konteks dan pengalaman partisipan yang terlibat (Sugiyono dalam Hasan *et al.*, 2025). Penelitian kualitatif

bertujuan mengungkap realitas subjektif dan konteks sosial yang mempengaruhi cara pandang seseorang melalui pengumpulan data-data yang bersifat deskriptif, antara lain wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Creswell dalam Hasan *et al*, 2025). Dengan demikian, penelitian kualitatif berfokus memberikan wawasan mendalam terkait alasan dan makna di balik suatu peristiwa atau kejadian.

Dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan analisis metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini berisi data dalam bentuk kata-kata mengenai hasil lapangan serta hampir tidak dinyatakan dengan angka. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau analisis suatu hasil penelitian, tanpa menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut (Sugiyono dalam Roosinda, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, maupun perilaku yang dapat diamati secara langsung sebagai representasi dari peran para *stakeholder* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang.

1.11.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat penelitian dilakukan yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur seperti pada kegiatan yang menjadi objek observasi dalam penelitian tersebut (Nasution dalam Rintawati, 2024). Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka penetapan penelitian ini adalah Ekowisata Mangrove Tapak di Desa Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena melihat potensi yang unggul Ekowisata Mangrove Tapak di Kota Semarang serta

memperhatikan permasalahan lain yang ada pada Ekowisata Mangrove Tapak di Kota Semarang akibat belum optimalnya peran *stakeholders*.

Fokus penelitian merupakan masalah utama yang berasal dari pemahaman peneliti, sekaligus menjadi pusat perhatian memperjelas dan memberi ruang lingkup topik yang akan diteliti (Moleong dalam Rintawati, 2024). Fokus penelitian ini adalah mengetahui peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak di Kota Semarang.

1.11.3 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 7 Fenomena Penelitian

No.	Fokus	Fenomena	Gejala
1.	Peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang	Peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan
			Pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir
			Kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal
			Pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan

2.	Faktor pendorong dan penghambat adalah faktor-faktor yang memengaruhi keberjalanan peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang	Policy creator	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan
		Implementer	Pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir
		Fasilitator	Kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal
		Koordinator	Pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan
		Koordinator	Kolaborasi, kemitraan dan kerja sama

1.11.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau pihak yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi tentang data penelitian yang menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan (Sugiyono dalam Kartika, 2024). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan snowball. Teknik *purposive* digunakan untuk menentukan informan dalam awal penelitian, namun apabila di lapangan ternyata memerlukan informasi lebih kompleks dari sebelumnya maka menggunakan teknik snowball untuk menentukan informan lainnya.

Purposive adalah metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti, dengan tujuan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam terhadap isu yang diteliti. Sementara itu, *snowball* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara meminta informal awal merekomendasikan informan lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pada penelitian ini, adapun daftar informasi yang dijadikan oleh penulis sebagai subjek penelitian ini, antara lain:

Tabel 1. 8 Subjek Penelitian

No	Informan	Jumlah	Teknik Pemilihan
1.	Kepala Sub Bagian Program DLHK Provinsi Jawa Tengah	1	Purposive
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Konservasi Lingkungan Hidup	1	Purposive
3.	Analisis Informasi Kebudayaan Disbudpar Kota Semarang	1	Purposive
4.	Sub Koordinator pada Bidang Perikanan Tangkap	1	Purposive
5.	Lurah Tugurejo	1	Purposive
6.	Ketua Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip	1	Purposive
7.	Ketua Kelompok Prenjak	1	Snowball

8.	Ketua Pokdarwis Bina Tapak Lestari	1	Snowball
Jumlah Informan		8	

Sumber : Diolah oleh penulis (2025)

1.11.5 Jenis dan Sumber Data

1.11.5.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk kata-kata, narasi, gambar, simbol, atau lainnya. Data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran *stakeholders* tersebut.

1.11.5.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yakni dikategorikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder (Edi Riadi dalam Sari dan Zefri, 2019). Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data maupun informasi yang diperoleh peneliti langsung dari sumber aslinya melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner (Edi Riadi dalam Sari dan Zefri, 2019).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, antara lain dari situs internet ataupun referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti (Edi Riadi dalam Sari dan Zefri, 2019).

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data, informasi, fakta, kenyataan, dan keterangan terkait penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilakukan dengan melibatkan interaksi antara peneliti dan informan untuk menggali informasi secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini berguna untuk menggali informasi tentang peran, kepentingan, pandangan, kebijakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan situasi di lapangan. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai keterlibatan dan peran *stakeholders* dalam

pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang dengan mengamati secara langsung.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merujuk pada teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen tertulis/non-tertulis yang berkaitan dengan peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Dokumen berupa Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Semarang, Laporan State of the World's Mangrove, Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah No 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah.

1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menata secara sistematis hasil yang diperoleh, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam upaya peningkatan pemahaman yang mendalam bagi peneliti terkait isu yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain (Muhadjir dalam Nurdewi, 2022). Berikut di bawah ini merupakan tahapan dalam analisis data menurut (Miles dan Huberman & Saldana, 2014).

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap paling awal dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui berbagai teknik seperti

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh informasi yang mendalam.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini peneliti mulai menyeleksi data yang relevan, melakukan proses pengkodean (coding), pengelompokan kategori, hingga penemuan tema-tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merangkum dan menajamkan data sehingga dapat mendukung proses analisis berikutnya.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap yang dilakukan dengan menyusun informasi/data yang telah dikondensasi dalam bentuk narasi kalimat, tabel, atau gambar yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan mengetahui pola-pola yang signifikan.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses merumuskan data yang telah dikondensasi dan disajikan. Penarikan kesimpulan dibuat menurut analisis data yang telah dilakukan selama penelitian di lapangan.

Adanya tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan bertujuan untuk membantu peneliti dalam

menjawab pertanyaan penelitian dan menciptakan temuan yang relevan berkaitan dengan peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi peran *stakeholders*.

1.11.8 Kualitas dan Validitas Data

Triangulasi sumber dalam validitas data merupakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan atau kredibilitas data dengan menggunakan berbagai metode dan sumber perolehan data yang berbeda.

Terdapat tiga jenis dalam triangulasi (Sugiyono dalam Rintawati, 2024), antara lain:

1. Triangulasi sumber merupakan pemeriksaan validitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda namun membahas objek atau peristiwa yang sama.
2. Triangulasi teknik merujuk pada proses untuk memverifikasi validitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data menggunakan berbagai teknik, akan tetapi tetap dengan sumber yang sama.
3. Triangulasi waktu adalah proses pemeriksaan validitas data dengan mempertimbangkan perubahan waktu yang menjadi salah satu komponen dalam mempengaruhi kredibilitas data.